

EVALUASI PROGRAM PENELUSURAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI PUTRA-PUTRI PAPUA (P5) ASAL KABUPATEN JAYAPURA

Ibrahim Kristofol Kendi*

Administrasi Perkantoran FISIP UNCEN

e-mail : gattusokendi@gmail.com

Abstrak : Artikel ini merupakan hasil penelitian mengenai evaluasi Program Penelusuran Pengembangan Potensi Putra/Putri (P5) Kabupaten Jayapura yang merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi putra-putri Papua asli Kabupaten Jayapura dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda usia produktif asli Kabupaten Jayapura yang potensial untuk melanjutkan Pendidikan pada program Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2), baik di dalam Negeri maupun di luar Negeri yang dikendalikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Potensi Sumber Daya (BKPPSD) Kabupaten Jayapura. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh data pustaka berupa surat kabar online yakni Pasifik Pos jubi dan surat kabar lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka baik secara online dan offline. Teknik analisa data dilakukan dengan menganalisis sejumlah data-data kualitatif dari sumber data yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Impelementasi Program Penelusuran dan Pengembangan Potensi Putra-Putri Papua (P5) Asal Kabupaten Jayapura belum efektif, terjadi inefisiensi, cakupan program belum menyeluruh, pemertaan sumber daya masih terfokus pada satu OPD, nilai-nilai kebijakan belum memenuhi preferensi kelompok sasaran, ketepatan program merupakan salah satu instrumen keberhasilan pembangunan dengan demikian tujuan yang diharapkan adalah Program P5 menjadi sebuah model kebijakan di Kabupaten Jayapura

Kata Kunci : Evaluasi, Program, P5, Jayapura

Abstract : This article is the result of a study on the evaluation of the Men / Women Potential Development Search Program (P5) of Jayapura Regency, which is a program to improve the quality and competence of Papuan children from Jayapura Regency by providing opportunities for the young generation of indigenous people of Jayapura Regency who have the potential to continuing education in the Undergraduate (S1) and Strata 2 (S2) programs, both domestically and abroad which are controlled by the Resource Potential and Development Agency (BKPPSD) of Jayapura Regency. The research method used is descriptive qualitative. Sources of research data obtained library data in the form of online newspapers namely Pacific Post jubi and other newspapers. Data collection techniques are done through literature studies both online and offline. Data analysis techniques are carried out by analyzing a number of qualitative data from available data sources. The results of this study indicate that the Implementation of the Potential Search and Development Program for Papuan Men and Women (P5) from Jayapura District has not been effective, inefficiencies have occurred, program coverage is not comprehensive, resource participation is still focused on one OPD, policy values have not met target group preferences, the accuracy of the program is one of the instruments for the success of development, so the expected goal is Program P5 to become a policy model in Jayapura Regency.

Keywords: Evaluation, Program, P5, Jayapura

PENDAHULUAN

Setiap kebijakan yang diimplementasikan perlu adanya rekomendasi penyempurnaan yang kemudian menjadi acuan dalam memperbaiki kebijakan tersebut hingga mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan mengamati implementasi Program Penelusuran Pengembangan Potensi Putra/Putri (P5) Kabupaten Jayapura pada lima tahun

pertama cukup memberikan dampak bagi perkembangan pembangunan khususnya perkembangan SDM di Kabupaten Jayapura dimana tujuan Program Penelusuran Pengembangan Potensi Putra/Putri (P5) Kabupaten Jayapura ini sebagai salah satu program untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi putra-putri Papua asli Kabupaten Jayapura dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda usia produktif asli Kabupaten

Jayapura yang potensial untuk melanjutkan Pendidikan pada program Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2), baik di dalam maupun di luar Negeri. Tujuan program ini juga adalah untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua, khususnya masyarakat asli Kabupaten Jayapura agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan wilayah sekaligus menjadi penggerak atau motivator kemandirian masyarakat, (Kendi 2018 : 1).

Dengan keberhasilan tersebut tidak berarti bahwa Program P5 telah memenuhi nilai-nilai preferensi kebijakan sebaliknya masih saja menyimpan sejumlah persoalan yakni keterlibatan PKP2A LAN diduga mengakibatkan terjadinya inefektivitas dalam proses penjangkauan, dan inefisiensi anggaran. Usahan untuk Mencapai Hasil Kebijakan yang ini ditandai dengan keberlanjutan program dan ketersediaan lapangan pekerjaan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura. Kecakupan program dengan membangun data base keret berbasis pemerintahan ondoafi/ondofolo atau kampung adat, pemerataan sumber daya, yang melibatkan OPD terkait yang berhubungan langsung dengan kualitas lulusan, responsivitas terkait prepreferensi dan nilai-nilai kebijakan dimana substansi dasar nilai-nilai program P5 apakah telah mengatur, mendistribusikan, mengalokasikan kewenangan serta sumber daya publik secara merata kepada kelompok masyarakat penerima manfaat (kelompok sasaran). Serta ketepatan Program Penelusuran Dan Pengembangan Potensi Putra-Putri Papua (P5) yang merupakan upaya percepatan pembangunan khususnya bidang Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Jayapura, tujuan yang diharapkan dari Program P5 yang kemudian dijadikan sebagai model kebijakan pembangunan SDM di Kabupaten Jayapura yang tujuannya adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Orang Asli Kabupaten Jayapura yang tersebut di empat wilayah pembangunan yang dilakkan secara representatif.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneropong evaluasi Program P-5 adalah deskriptif kualitatif. Ruang lingkup penelitian ini evaluasi kebijakan Program Pemberdayaan Putra-Putri Papua Asli Kabupaten Jayapura dikendalikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Potensi Sumber Daya (BKPPSD) Kabupaten Jayapura. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data pustaka surat kabar online yakni Pasifik Pos jubi dan surat kabar lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka baik secara online dan offline. Teknik analisa data dilakukan dengan menganalisis sejumlah data-data kualitatif dari sumber data yang tersedia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut O Jones (dalam Ekowati 2009 : 108) evaluasi adalah penilaian dengan merit proses dengan program pemerintah. Kata evaluasi seringkali digunakan bermakna penelitian evaluasi. Adapun penelitian evaluasi mengarah pada usaha ilmuwan sosial secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data.

Evaluasi kebijakan selalu diawali dengan sebuah nilai, secara langsung maupun tidak langsung, sebagai contoh nilai kehidupan yang lebih baik untuk hidup dalam jangka waktu yang lebih lama (Ekowati, 2009 : 105). Dalam arti yang lebih spesifik Dunn (2003 : 608) menyatakan bahwa evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan tujuan atau sasaran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Menurut Kendi (2016 : 81-83) studi evaluasi kinerja Program/kegiatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Pertama*,

penilaian dilakukan terhadap sasaran pencapaian pembangunan sebagaimana tertuang di dalam dokumen perencanaan, *Kedua*, mendalami dan mengidentifikasi manfaat yang diperoleh serta berbagai faktor kendala dan faktor yang memberi kontribusi dalam implementasi rencana pembangunan dimaksud. Untuk mengetahui dan menilai kemanfaatan program/kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksanakan, digunakan indikator evaluasi yang meliputi : Efektivitas, efisiensi, kecakupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan program dengan kebutuhan masyarakat.

Idealisme Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Wolman (dalam Ficher Miller dan Sidney 2015 : 554) evaluasi kebijakan dilakukan untuk untuk melakukan dua hal, *Pertama* penelitian evaluasi sebagai alat analisis menyelidiki program kebijakan untuk mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan penilaian kinerjanya baik proses dan hasil. *Kedua*, evaluasi sebagai tahap dari siklus kebijakan yang umumnya mengacu pada melaporkan kembali informasi tersebut pada proses pembuatan kebijakan. Dua pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa evaluasi kebijakan mengharuskan adanya penelitian mendalam dan menempatkan evaluator dan implementor pada dua kutub yang berbeda bila perlu direkayasa dalam situasi saling bermusuhan (dalam konteks positif). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesepakatan-kesepakatan tertentu yang pada akhirnya berkontribusi terhadap ketidakberhasilan kebijakan atau program pembangunan. Disisi lain implementasi program atau kebijakan mengarah pada tahapan penyempurnaan. Setiap tahun nilainya semakin mencapai titik sasaran, artinya program atau kebijakan yang sama tidak harus berhenti pada periode tertentu, jika demikian maka hasilnya tidak dapat diukur. Untuk mengukur keberhasilan suatu program atau kebijakan dibutuhkan waktu yang cukup lama misalnya lima sampai sepuluh tahun dengan melakukan evaluasi setiap tahun guna menyelidiki dan menemukan kekurangan-kekurangan yang terjadi yang dilanjutkan dengan penyempurnaan.

Mengenai dua aktor (implementor dan evaluator) Bovens, T Hart dan Kupers (2015 : 403) menekankan bahwa ketika kebijakan publik diadopsi dan program dilaksanakan politik pembuatan kebijakan tidak berakhir. Kontraversi politik dan birokrasi atas sifat masalah yang harus ditangani dan cara terbaik yang digunakan untuk melakukannya yang menjadi ciri perumusan kebijakan dan tahap-tahap pemilihan kebijakan dari siklus kebijakan tidak tiba-tiba surut ketika mengikat keputusan politik dibuat untuk mendukung opsi X atau Y.

Pernyataan diatas bila disederhanakan bahwa dengan adanya opsi X dan Y menunjukkan bahwa kemungkinan implementasi program dan kegiatan pembangunan secara langsung ataupun tidak langsung melibatkan dua kubu yang berbeda. Perbedaan inilah resistensi dan kredibilitas lembaga evaluasi dipertaruhkan. Hasil evaluasi tidak dalam proses politik. Sebaliknya aspek-aspek administrasi menjadi prioritas. Alasan administrasi dimaksudkan agar dokumen implementasi program tidak menyimpang dari fakta riil di lapangan. Misalnya anggaran yang diperuntukan bagi pembangunan puskesmas tidak digunakan untuk pembelian obat-obatan, meskipun tujuan program tersebut adalah sama yakni meningkatkan layanan kesehatan namun nomenklatur anggaran sangat berbeda sehingga terjadi penyimpangan.

Sifat Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003 : 608) evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakan dengan metode-metode analisis lainnya, antara lain fokus nilai. Menurut Dunn evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program.

Fungsi Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn (2003 : 608-609), evaluasi kebijakan Pertama dan yang paling penting evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu

(misalnya perbaikan kesehatan) dan target tertentu (sebagai contoh 20% pengurangan penyakit kronis pada tahun 1990 telah tercapai).

Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasar pemilihan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan sasaran analisis dapat menguji alternatif sumber nilai misalnya kelompok kepentingan, dan pegawai negeri kelompok-kelompok klien maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif).

Kinerja Program P5

Kinerja program P5 sebagaimana dirilis Kendi (4: 2018) meliputi Jumlah Program Studi yang ditawarkan dari Tahun Anggaran 2007-2011, Kesenjangan antara yang Berhasil dan Tidak Berhasil Tahun 2007-2011, Jumlah Peserta Tes P5 berdasarkan Pilihan Studi dan Data Penggunaan Anggaran pada Program P5.

Jumlah Program Studi yang ditawarkan

Program studi yang ditawarkan dalam program P5 sangat beragam, berikut ini data jumlah program studi yang ditawarkan pada program P5 dari tahun Anggaran 2007 hingga 2011 ditampilkan pada tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Program Studi Yang Ditawarkan

No	Tahun Anggaran	Program Yang Tawarkan
1	2007	<p>Australia Languages Fondation (Studi Luar Negeri)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bachelor of Information Tekchnology pada RMIT University. 2. Strata satu pada Quesland University of Technology. 3. Bachelor of International Relations ast Australia National Unniversity, Bachelor of International Technology pada Swimburne University of Technology. 4. Bachelor of Art International Study University of Camberra. 5. Bachelor of Commerse University of Camberra. 6. Bachelor of Manajemen Deaking University. 7. Master of Planning Deaking Univrsity. 8. Diploma of Aviation at Tafe WA Perth. 9. Master of Public Administration pada Australian National University. 10. Master of Enggineering Victoria University International. 11. MIBT Diploma of Binsnis dan 12. Master of Commerse Deaking University International. <p>Universitas Pelita Harapan Jakarta (Studi Dalam Negeri)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Pelita Harapan Jakarta Indonesia <ol style="list-style-type: none"> a. S-2 Bidang Teknologi Pangan. b. S-2 Bidang Komunikasi c. S-1 Teknik Arsitektur d. S-1 Desain Interior e. S-1 Akuntansi f. S-1 Hubungan Internasional g. S-2 Pendidikan h. S-2 Manajemen i. S-2 Ilmu Komunikasi j. S-1 Ilmu Hukum k. S-1 Teknil Sipil l. S-1 Ilmu Administrasi

2	2008	Kursus Bahasa Inggris di IALF Denpasar Bali Kuliah di AUstrlai Program yang diikuti : a. Bachelor of International Development at La Trobe University Melbourne b. Bachelor of Humanitarian of Community Study at Charles Darwin University. c. Advan Diploma Tourisme Manajemen at La Troube d. University Melbourne dan Bachelor of Bisnis at La Trobe e. University Melbuurne.
3	Tahun 2009	Akademi Militer (AKMIL)
4	Tahun 2010	Akademi Kepolisian (AKPOL)
5	Tahun 2011	Universitas Satya Wacana (UKWS) Salatiga

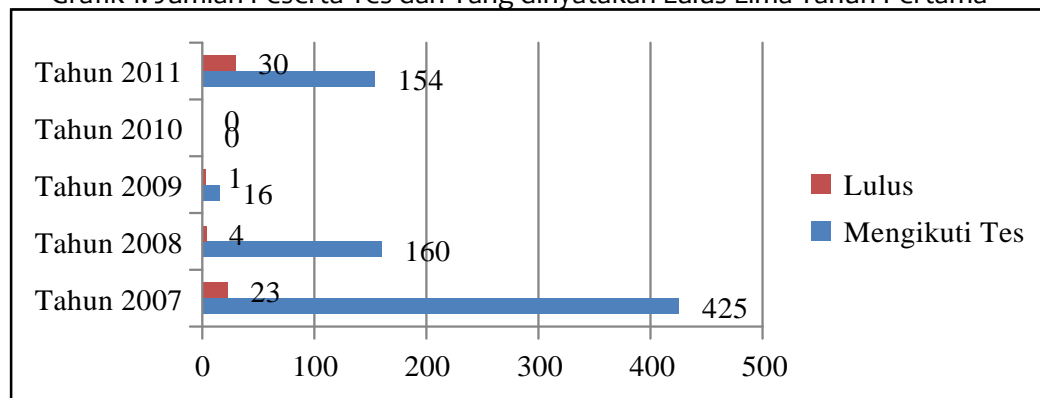
Sumber : tabloidjubi (dalam Kendi Ibrahim 2018 diolah)

Berdasarkan tabel 1, dapat dikatakan bahwa jumlah program studi yang ditawarkan melalui Program P5 adalah sebanyak 50,13% didominasi oleh program studi di universitas luar negeri dan sisanya 46,88% program studi pada universitas dalam negeri. Hanya selisih 6,25%.

Kesenjangan antara yang Berhasil dan Tidak Berhasil

Setidaknya terdapat kesenjangan pada proses seleksi yang terlihat pada jumlah peserta tes yang dinyatakan lulus dan tidak lulus dari tahun 2007-2011. Data kesenjangan tersebut ditampilkan pada garfik 1.

Grafik 1. Jumlah Peserta Tes dan Yang dinyatakan Lulus Lima Tahun Pertama



Sumber : Tabloidjubi.com (diolah)

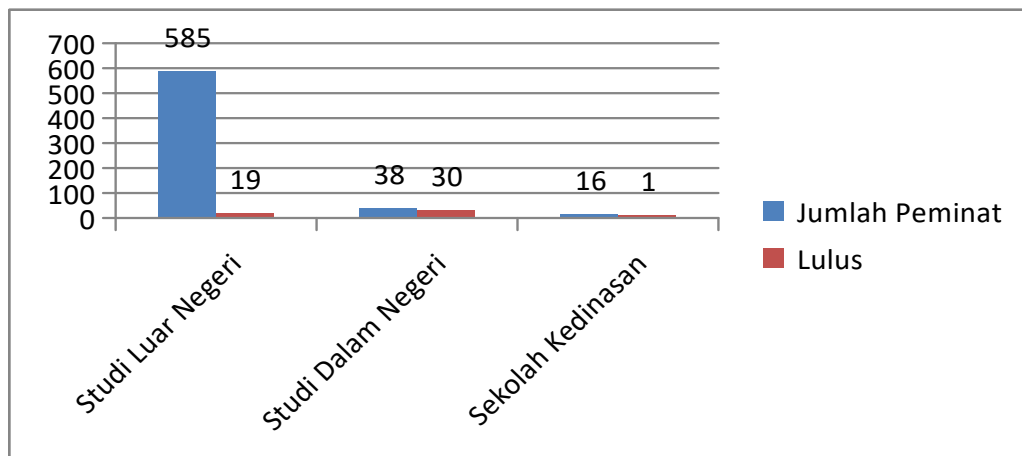
Pada grafik 1, menunjukan bahwa terdapat kesenjangan antara jumlah peserta tes dan yang dinyatakan lulus. Di tahun pertama (2007) hanya 23 orang atau 5,41% dari 425 peserta tes yang dinyatakan lulus. Ditahun kedua (2008) hanya 2,5% atau 4 orang dari 160 orang peserta tes yang dinyatakan lulus. Tahun ketiga (2009) hanya 1 orang dari 16 peseserta yang lulus. Tahun 2010 PEMDA Kabupaten Jayapura menawarkan sekolah kedinasan namun sepi peminat

sehingga pada tahun 2011 program reguler kembali dibuka dan 30 peserta seleksi dinyatakan lulus dari total 154 orang yang melamar.

Jumlah Peserta Tes Berdasarkan Pilihan Studi

Jumlah peminat berdasarkan pilihan studi yang meliputi pendidikan luar negeri, dalam negeri dan sekolah kedinasan ditampilkan dalam grafik 2.

Grafik 2. Jumlah Peminta Berdasarkan Pilihan Studi



Sumber : Tabloidjubi.com (diolah)

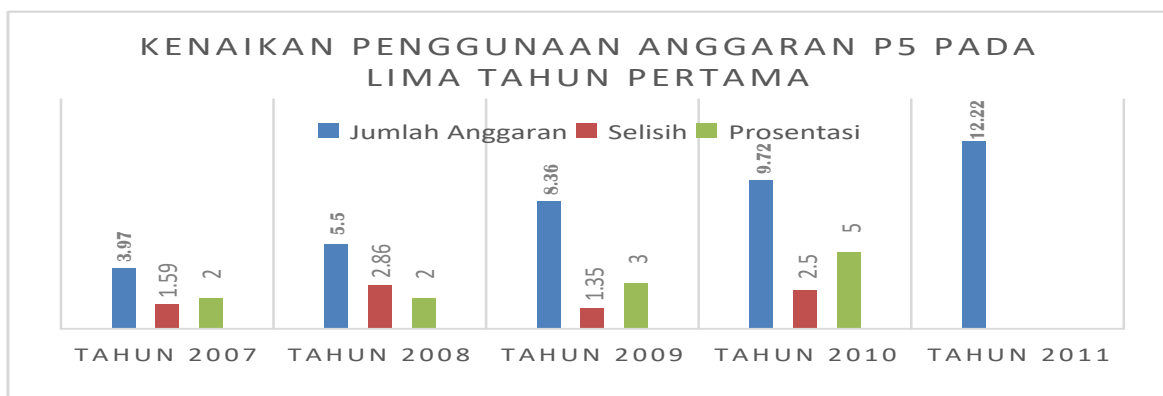
Akumulasi jumlah pelamar untuk studi di luar negeri sangat besar, dimana lima tahun pertama jumlah pendaftar mencapai 585 orang sementara yang lulus hanya 19 orang, sedangkan studi dalam negeri cukup ideal sementara untuk sekolah kedinasan sangat memprihatinkan.

Penggunaan APBD untuk Program P5

APBD yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus sebesar Rp. 39.726.415.381,- (Tiga Puluh Sembilan

Miliar Tujuh ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) untuk mendapatkan 50 orang selama lima tahun pertama. Nilai ini sudah termasuk pembiayaan dalam proses penjangkaran hingga pemberian bantuan biaya pendidikan (beasiswa) hingga akhir studi dari peserta P5 tersebut. Setiap tahun alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai Program P5 Kabupaten Jayapura mengalami peningkatan. kenaikan penggunaan anggaran tersebut dapat dilihat pada grafik 3.

Grafik 3. Kenaikan Penggunaan Anggaran P5 pada Lima Tahun Pertama



Sumber : Tabloidjubi.com (diolah)

Pada grafik 3, menunjukkan bahwa Program P5 Kabupaten Jayapura lima tahun pertama bersumber dari Dana Otonomi Khusus sebesar Rp. 39.726.415.381,- dengan

rincian tahun 2007 sebesar Rp. 3.907.000.000, tahun 2008 sebesar Rp. 5.500.000.000, tahun 2009 sebesar Rp. 8.368.21.500, tahun 2010 Rp. 9.721.498.000,

tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 12.229.704.881, (tabloidjubi.com). Tahun 2007 – 2008 prosentasi dana Otsus dari total anggaran sebesar 9,83% atau 4,01%, tahun 2008 – 2009 selisihnya menjadi 13,84% atau naik sekitar 7,22%, pada tahun 2009 – 2010 selisihnya menjadi 21,06% atau naik sekitar 3,41%, pada tahun 2010 – 2011 selisihnya menjadi 24,47% atau naik sekitar 6,31%.

Evaluasi P5

Evaluasi Program Penelusuran Pengembangan Potensi Putra/Putri Kabupaten Jayapura (P5) difokuskan pada aspek efektivitas, efisiensi, kecakupan, biaya dan manfaat, pemerataan kepada kelompok sasaran, responsivitas terhadap preferensi nilai-nilai kebijakan kepada masyarakat asli Kabupaten Jayapura serta tujuan yang diharapkan

Efektivitas P5

Meskipun dukungan dan kesediaan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam membekal Program P5 Kabupaten Jayapura ini cukup baik namun keterlibatan PKP2A LAN Makassar dalam proses perekrutan atau penjangkaran Putra-Putri Papua Asli Kabupaten Jayapura baik yang studi di dalam maupun di luar negeri kurang efektif dan kurang tepat. Dimana Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (PKP2KP LAN) mempunyai tugas menyelenggarakan kajian dan inovasi di bidang administrasi negara, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparatur, melaksanakan pemetaan kompetensi dan kapasitas aparatur serta pengembangan sistem informasi di bidang tugasnya, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala PKP2A tersebut. Bila disinkronkan antara subunit tugas PKP2P LAN dengan Program P5 jelas tidak tepat. P5 adalah program beasiswa sedangkan PKP2P LAN adalah salah satu lembaga teknis di Lembaga Administrasi Negara yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta melakukan pemetaan kompetensi dan peningkatan kapasitas aparatur sipil Negara. Hal ini jelas berdampak pada kekeliruan

dalam menentukan instrumen yang digunakan dalam proses perekrutan terutama terkait dengan subunit dari P5 itu sendiri.

Dengan demikian keterlibatan perguruan tinggi penyelenggara atau perguruan tinggi terdekat merupakan suatu alternatif terbaik yang perlu dipertimbangkan dalam proses penyusunan instrumen hingga perekrutan calon penerima beasiswa dari program tersebut.

Efisiensi P5

Efisiensi merupakan perbandingan antara hasil dengan biaya (hasil/biaya). 58 peserta yang ditamatkan bila dibandingkan dengan APBD yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus sebesar Rp. 39.726.415.381,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Tujuh ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) yang digunakan untuk membiayai program tersebut menunjukkan bahwa terjadi inefisiensi anggaran. Bila dihitung secara sederhana jumlah APBD yang tersedia pada 5 tahun pertama dibagi dengan 58 peserta tersebut maka masing-masing peserta diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp. 684,938,196.22 (Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah). Jumlah ini termasuk membiayai PKP2-LAN dalam menyusun instrumen dan juga proses perekrutan calon penerima beasiswa. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu meminimalisir terjadinya inefisiensi anggaran dengan melibatkan perguruan tinggi penyelenggara atau perguruan tinggi terdekat dalam menyusun instrumen dan proses perekrutan dengan tidak mengabaikan standar perekrutan yang disyaratkan.

Usahan untuk Mencapai Hasil Kebijakan

Keberlanjutan dari Program P5 membuktikan keseriusan Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam meningkatkan pembangunan SDM di kabupaten tersebut. Pengembangan SDM ini kemudian dibuktikan pula dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang bagi para lulusan program P5 dimaksud sebagaimana diungkapkan oleh Bupati Kabupaten

Jayapura Mathius bahwa pihak pemerintah daerah akan melakukan pembicaraan dengan Menteri Negara dan Aparatur Negara (Menpan) RI untuk membuka formasi-formasi yang dibutuhkan agar proses pengusulan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dipercepat. Adapun tenaga kerja yang saat ini adalah tenaga medis, sehingga lulusan STIKES Telegorejo Semarang akan ditempatkan Rumah Sakit Dian Harapan di Waena karena telah menanda-tangani kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jayapura. Begitupula dengan akuntan dan IT. Sementara untuk mahasiswa yang dikirim ke Universitas Semen Indonesia sudah otomatis mereka akan langsung terserap dan bekerja dalam industri semen yang akan dibuka di Kabupaten Jayapura nantinya. Termasuk di perguruan tinggi Surya Institut, Universitas Gajah Mada (UGM), perguruan tinggi pariwisata di Bali, dimana setelah selesai tempat kerja sudah tersedia sehingga diharapkan mahasiswa-mahasiswa ini hanya serius dan fokus untuk belajar.

Kecakupan

Sistem data base keret berbasis wilayah pemerintahan ondoafi/ondofolo di empat wilayah pembangunan penting untuk dilakukan. Karena selain menyatakan dan mempertahankan eksistensi keturunan Orang Asli Kabupaten Jayapura Orang database ini juga berfungsi mengadministrasikan komunitas masyarakat adat yang terdapat dalam empat wilayah pembangunan di Kabupaten Jayapura. Data base ini juga mendukung kebijakan Otonomi Khusus bukan saja program P5 tetapi semua kebijakan affirmative di Provinsi Papua sehingga menjadi model bagi pembangunan di Provinsi Papua.

Pemerataan Sumber Daya

Dari segi finansial, alokasi Dana Otonomi Khusus untuk membiayai Program P5 Kabupaten Jayapura setiap tahun mengalami peningkatan, ini berarti penyerapan anggaran cukup baik. Penyerapan anggaran tersebut mengindikasikan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura dalam melanjutkan program tersebut. Namun disisi lain pemerintah daerah perlu mengkaji kembali substansi Program P5 ini bahwasanya program

tersebut merupakan program beasiswa yang segyanya melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu lembaga teknis yang menentukan kualitas lulusan yang dibutuhkan oleh peserta P5 dimaksud melalui lulusan SMA/SMK dikelolanya, sehingga anggaran yang diperuntukan bagi program P5 tersebut dialokasikan secara merata kepada instansi-instansi terkait terutama Dinas Pendidikan dan Pengajaran sebagai instansi yang sangat penentuan kualitas SDM peserta didik di Kabupaten Jayapura.

Responsivitas Terkait Preferensi dan Nilai-nilai Kebijakan

Substansi dasar nilai-nilai kebijakan publik adalah bagaimana mengatur, mendistribusikan, mengalokasikan kewenangan serta sumber daya publik secara merata kepada kelompok masyarakat penerima manfaat (kelompok sasaran). Sebuah kebijakan dikatakan berhasil manakala preferensi masyarakat terpenuhi. Program P5 ini kemudian melahirkan tanggapan beragam, mulai dari proses perekrutan yang belum representatif, pengiriman uang kuliah dan biaya hidup yang sering mengalami keterlambatan, pemulangan peserta beasiswa yang dianggap sepihak tanpa dasar hukum yang jelas mengindikasikan bahwa respon masyarakat serta preferensi mereka terhadap nilai-nilai dasar dari pada Program P5 ini belum maksimal atau perlu ditingkatkan dengan mengavaluasi beberapa indikator yang telah disebutkan diatas. Perlu adanya evaluasi bersama yang melibatkan lembaga-lembaga teknis serta masyarakat Kabupaten Jayapura terutama penerima beasiswa P5 agar program tersebut lebih ditingkatkan lagi.

Ketepatan Program P5

Program P5 merupakan upaya percepatan pembangunan khususnya bidang Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Jayapura. Penyeragaman kebijakan pendidikan di seluruh Indonesia kemudian melahirkan marginalisasi khususnya daerah timur Indonesia yang dianggap tertinggal dan lain sebagainya. Sehingga Program P5 merupakan akselerasi kebijakan pembangunan di bidang SDM dengan mengaffismasikan Orang Asli Kabupaten Jayapura agar bersaing dengan

daerah-daerah lain di Indonesia. Program P5 ini juga merupakan manifestasi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yakni sektor pendidikan. Dengan demikian Program P5 sangat tepat sebagai salah satu program percepatan pembangunan khususnya dalam bidang SDM di Kabupaten Jayapura.

Tujuan yang Diharapkan

Tujuan digulirkannya kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, adalah meningkatkan akses masyarakat melalui infrastruktur, pembangunan kesehatan dan ekonomi kerakyatan dan pendidikan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Program P5 merupakan sebuah akselerasi kebijakan pembangunan SDM di Kabupaten Jayapura yang tujuannya adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Orang Asli Kabupaten Jayapura yang berada di empat wilayah pembangunan yang dilakukan secara representatif. Tujuan Program P5 semakin mencapai titik yang diharapkan dengan diimplementasikannya Peraturan Daerah Khusus No. 25 Tahun 2013 tentang Penerimaan Pembagian Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus dimana alokasi keuangan Dana Otonomi Khusus ditetapkan 20% diperuntukan bagi daerah Provinsi dan 80% untuk Kabupaten/Kota artinya alokasi dana dengan presentase tertinggi bagi daerah kabupaten/kota yang menjadikan orang asli Papua sebagai kelompok sasaran dengan program prioritas yang meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan termasuk didalamnya adalah Program P5 asal Kabupaten Jayapura.

Untuk mencapai tujuan kebijakan Pengembangan SDM di Kabupaten Jayapura Pemerintah Daerah secara spesifik melakukan identifikasi kelompok sasaran melalui pendataan orang asli Kabupaten Jayapura yang tersebar di empat wilayah pembangunan. Pendataan ini dilakukan berbasis keret dalam struktur pemerintahan adat (Ondoafi/Ondofolo) sehingga proses perekrutannya dilakukan secara representatif yakni mewakili semua masyarakat asli Kabupaten Jayapura.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut.

Kesimpulan

Implementasi Program P5 asal Kabupaten Jayapura belum efektif. Keterlibatan PKP2A LAN yang memiliki suntansi tugas yang tidak sinkron dengan dengan program tersebut memungkinkan terjadi kekeliruan dalam proses seleksi termasuk penyusunan instrumen seleksi. Dengan keterlibatan lembaga tersebut berdampak pada ketidakefisienan terkait alokasi anggaran yang digunakan. Dengan mempersiapkan lapangan pekerjaan bagi para lulusan program P5 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura berusaha untuk benar-benar memberikan manfaat dengan adanya program P5 bagi Orang Asli Kabupaten Jayapura. Sistem data base keret berbasis wilayah pemerintahan adat merupakan langkah penting untuk menentukan kelompok sasaran di empat wilayah pembangunan. Alokasi anggaran belum dialokasikan secara merata karena terjadi kekeliruan dalam menentukan organisasi struktur organisasi atau organisasi penyelenggara.

Tanggapan pro dan kontra menunjukkan bahwa Program P5 belum sepenuhnya memenuhi preferensi masyarakat Asli Kabupaten Jayapura. Implementasi Program P5 Asal Kabupaten Jayapura Provinsi Papua merupakan manifestasi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang kemudian diimplementasikan melalui Perdasus No. 25 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi khusus. Program P5 akan menjadi model kebijakan pembangunan SDM manakala data base Orang Asli Kabupaten Jayapura di bangun dengan pendekatan system pemerintahan adat.

Saran

Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura perlu mengkaji kembali organisasi penyelenggara dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai OPD yang menangani secara langsung kualitas peserta didik di daerah tersebut dan juga lembaga

penyelenggara seleksi yang bidang tugasnya terkait dengan program beasiswa yang ditawarkan dalam hal ini tinggi penyelenggara atau perguruan tinggi terdekat. Dengan demikian alokasi anggaran bisa ditekan untuk mencegah terjadinya inefisiensi. Penciptaan lapangan pekerjaan bagi para lulusan program P5 perlu dilakukan melalui analisis kebutuhan yang tepat sehingga pemerintah daerah tidak dianggap melakukan sesuatu yang tidak berguna bagi masyarakat. Pemerintah daerah memberikan instruksi kepada kepala-kepala distrik yang kemudian diteruskan kepada kepala-kepala kampung dan sistem pemerintahan adat untuk melakukan pendataan Arang Asli Kabupaten Jayapura dalam di empat wilayah pembangunan yang kemudian digunakan sebagai basis data dalam rangka kelanjutan program P5 dimaksud.

Alokasi anggaran perlu didistribusi secara merata. Untuk tujuan tersebut pemerintah daerah perlu mengkaji kembali organisasi penyelenggara terutama terkait dengan OPD yang menangani secara langsung pengembangan kualitas peserta didik di Kabupaten Jayapura dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Perlu adanya komitmen pemerintah daerah bahwa Program P5 adalah salah satu kebijakan peningkatan atau pengembangan SDM kebutuhan peserta beasiswa misalnya biaya sekolah, biaya hidup, pemulangan peserta didik yang dianggap melanggar ketentuan dibuktikan dengan dasar hukum yang kuat agar preferensi masyarakat Asli Kabupaten Jayapura benar-benar terakomodir. Program P5 asal Kabupaten Jayapura Provinsi Papua merupakan manifestasi UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang kemudian diimplementasikan melalui Perdasus No. 25 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi khusus sehingga program ini harus ditetapkan sebagai sebuah produk hukum daerah atau PERDA.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn William, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kendi, Kristofol Ibrahim, 2018, *Implementasi Program Penelusuran Dan Pengembangan Potensi Putra-Putri Papua (P5) Asal Kabupaten Jayapura Provinsi Papua*, (Jurnal Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 16 No. 1, 2018 hal 4).
- Kendi, Kristofol Ibrahim, 2016, *Analisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi dalam Perspektif Otonomi Khusus Papua*, Yayasan Emereuw Sentani Papua.
- Nugroho Riant, 2014, *Public Policy, Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan* (Edisi Ke 5), Alex Media, Komputindo Gramedia, Jakarta.
-, 2013, *Metode Penelitian Kebijakan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Paul Bobenz Mark dan Kuipers Saneke Hart T, 2015, *Politik Evaluasi Kebijakan, Dalam Michel Moran, Marthin Rein dan Robert E. Goodin : Handbook Kebijakan Publik, (Handbook of Public Policy)*, Nusa Media Bandung.
- Pulzl Helga dan Treib Oliver, 2015, *Implementasi Kebijakan Publik, Dalam Ficher Frank, Miller J. Gerald dan Sidney S. Mara : Handbook Analisis Kebijakan Publik, Teori Politik dan Metode (Handbook of Public Policy, Politic and Methods)*, Nusa Media Bandung.
- Winarno Budi, 2016, *Kebijakan Publik di Era Globalisasi, Teori dan Proses, Studi Kasus Komparatif, CAPS*, Yogyakarta.